



**Website:**  
ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

**\*Correspondence:**  
avianiw@umm.ac.id

**DOI:** 10.22219/jrak.v12i2.22014

**Citation:**  
Widyastuti, A., Titong, W, O.,  
Ulum, I. (2022). Kompetensi Sdm  
Sebagai Mediasi Dalam Good  
Governance Dan Anggaran  
Berbasis Kinerja Pada Pengelolaan  
Dana Bos. *Jurnal Reviu Akuntansi  
Dan Keuangan*, 12(2), 378-397.

**Article Process**

**Submitted:**  
July 28, 2022

**Reviewed:**  
August 22, 2022

**Revised:**  
August 25, 2022

**Accepted:**  
August 30, 2022

**Published:**  
August 31, 2022

**Office:**  
Department of Accounting  
University of  
Muhammadiyah Malang  
GKB 2 Floor 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, East Java,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223  
E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

## KOMPETENSI SDM SEBAGAI MEDIASI DALAM GOOD GOVERNANCE DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PENGELOLAAN DANA BOS

Aviani Widyastuti<sup>\*1</sup>, Winda Oktamelinia Titong<sup>2</sup>,  
Ihyaul Ulum<sup>3</sup>

**Affiliation:**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Malang, Malang, Indonesia

### ABSTRACT

Fenomena yang sering terjadi dalam pengelolaan dana BOS adalah masalah penyelewengan dan ketidakefektifan, dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terdapat 240 kasus korupsi dan dari kasus tersebut korupsi terbanyak adalah terkait penggunaan dana BOS yaitu sebanyak 52 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Governance dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Dana BOS dengan Kompetensi SDM sebagai variabel Intervening. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan jumlah responden 66 orang. Kuesioner disebar ke sekolah-sekolah swasta di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah dan diolah menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 3.0. Penelitian ini menggunakan kompetensi SDM yang dinilai sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan dana BOS, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance baik secara langsung maupun melalui Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOS, Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana BOS, dan Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana BOS melalui Kompetensi SDM.

**KEYWORDS:** Anggaran Berbasis Kinerja; Good Governance; Kompetensi SDM; Pengelolaan Dana BOS.

## INTRODUCTION

Dewasa ini fenomena yang seringkali terjadi dalam pengelolaan dana BOS adalah masalah penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS meskipun tujuan pemerintah melalui program tersebut adalah demi kelangsungan pendidikan di Indonesia namun terkadang sistem yang ada menjadi *boomerang* tersendiri dan mendatangkan masalah baru. Padahal Tujuan dari program dana BOS sendiri adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan namun pada faktanya masih banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS dimana hasil kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa selama 6 tahun dari tahun 2016 hingga September 2021, aparat penegak hukum telah menindak sebanyak 240 kasus korupsi pada sektor pendidikan dan selama rentang waktu tersebut Negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,6 triliun bahkan jika ditarik mundur dari tahun 2006 hingga September 2021 negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,9 triliun dari kasus ini korupsi terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS yakni berjumlah 52 kasus yang mana setara dengan 21,7% dari total kasus korupsi pada sektor pendidikan selama 6 tahun terakhir (Databoks.katadata.co.id, 2022).

Memang salah satu kendala yang menjadikan kualitas pendidikan sekolah belum juga membaik dari segi pelayanan dan juga penyediaan pendidikan adalah karena terbatasnya alokasi dana dari pemerintah (Bastian, 2007). Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu persoalan fundamental dalam pendidikan yang kemudian dicermati, ditangani serta dicarikan solusi yang konstruktif oleh pemerintah adalah dari segi pembiayaan pendidikan, tidak hanya itu saja permasalahan mentalitas yang buruk mengenai perencanaan tata kelola, serta koordinasi dan lain sebagainya seringkali menjadi batu sandungan disetiap program pemerintah (Rais, 2019). Untuk itu dalam usahanya, pemerintah memastikan agar prinsip keadilan dan juga pemerataan layanan pendidikan dapat diwujudkan melalui pembiayaan pendidikan melalui skema dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Didalam pembiayaan, dana BOS memberikan kontribusi sekitar 70% pada madrasah swasta dari seluruh kebutuhan pembiayaan madrasah sedangkan pada madrasah negeri dana BOS memberikan kontribusi sekitar 30% dimana fakta ini menunjukkan bahwa dana BOS hanya menjangkau sebagian kecil dari kebutuhan pembiayaan di madrasah negeri (Pendidikan Agama dan Keagamaan Tim Peneliti Puslitbang, 2011).

Pengelolaan dana BOS reguler dilakukan berdasarkan prinsip: a) fleksibilitas yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan; b) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan; c) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan e) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan (Republik Indonesia, 2022). Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsi-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat (Republik Indonesia, 2000).

Prinsip *good governance* yang digunakan dalam pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Republik Indonesia, 2005). Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan

visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2010). Esensi dari sistem pengukuran dan penilaian kinerja akan terfokus pada pengambilan tindakan pada setiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai pada saat tertentu, di mana instansi pemerintah dalam upayanya menuju tujuan dan sasaran umum yang ditetapkan dalam rencana strategisnya. Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja ini akan mengukur hasil, akibat, atau hasil dari pengeluaran anggaran pemerintah terhadap program penyelenggarannya. Suatu tujuan dapat dicapai melalui pengendalian yang dilakukan oleh individu yang berperan sebagai mediator antara kebutuhan organisasi dan mereka yang membutuhkan, di sisi lain *human variable* merupakan variabel yang penting karena adanya kompleksitas dalam suatu organisasi dimana manusia memiliki perbedaan satu sama lain yang dapat mempengaruhi *performance* organisasi (Sulistiyani dan Rosidah, 2009). Kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan kinerja yang tinggi sekali dalam melakukan suatu pekerjaan (Spencer dan Spencer, 1993).

Wirakusuma *et al.* (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, *Good Governance*, dan Budaya Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS baik secara parsial ataupun secara simultan. Sementara itu Zeyn (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Selain itu, Rahmawati dan Ishak (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dimana penyerapan anggaran ini termasuk pengelolaan anggaran sehingga dapat disimpulkan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian.

Pemilihan lokasi dalam penelitian adalah pada Madrasah Aliyah (MA) swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yaitu MTs Al-Ikhlas Tontouan, MA Al-Ikhlas Tontouan, MTs Al-Khairaat Luwuk dan MA Al-Khairaat Luwuk. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena tidak semua sekolah swasta memunggut dana dari orangtua siswa seperti pada sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang mana sumber utama keuangan dari sekolah tersebut adalah dari dana BOS dimana madrasah yang berada dibawah naungan Kemenag yang memiliki yayasan mempunyai maksud dan tujuan pendidikan tidak lain untuk membantu dan meringankan beban orang tua yang tidak memiliki biaya atau tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya karena memang sekolah-sekolah swasta yang mengatasnamakan yayasan seringkali memiliki tujuan sosial sehingga tidak membebankan biaya sekolah yang mahal kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi agar mereka dapat terus bersekolah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel kompetensi SDM sebagai variabel *intervening* karena dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara tepat dan transparan kepada masyarakat serta pemerintah dimana sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting yang secara nyata melalui kontribusi SDM-lah tujuan organisasi dapat dicapai. Selain itu adanya pengaruh dari faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan pengelolaan dana BOS seperti rendahnya transparansi, akuntabilitas, keterlambatan memberikan laporan penggunaan dana BOS

hingga kurangnya kemampuan pegawai yang menjadi pengelola dana BOS, menjadikan penting apabila pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan baik karena akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar untuk itu dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 3 variabel yang akan diteliti yaitu *good governance*, anggaran berbasis kinerja dan kompetensi SDM.

Berdasarkan teori keagenan dalam penelitian ini, pihak sekolah (agen) dituntut untuk dapat melaporkan pengelolaan dana BOS dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dapat hbermanfaat bagi para pengguna informasi secara terperinci serta transparan dimana hal tersebut merupakan prinsip dari *good governance* yang dapat mendorong pengelolaan dana BOS menjadi lebih baik.

Penelitian terdahulu telah meneliti terkait pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan dana BOS antara lain yang dilakukan oleh Wirakusuma *et al.* (2017), Fauzan (2014), dan Rakhmawati (2018) yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS. Setiap lembaga pendidikan (sekolah) didalam pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah dalam hal ini dana BOS wajib menganut prinsip-prinsip *good governance* agar dapat mendukung kualitas dari pengelolaan dana BOS itu sendiri yaitu diantaranya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi sehingga apabila suatu sekolah telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik maka tingkat efektivitas dalam mengelola sumber dana yang dimiliki dalam hal ini dana BOS juga akan mengalami peningkatan.

### **H<sub>1</sub>: Good Governance berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana BOS**

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang orientasinya adalah pada *output* atau keluaran organisasi yang erat kaitannya dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi (Bastian, 2010). Penganggaran yang dilakukan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut (Darise, 2008 ). Berdasarkan teori keagenan penetapan anggaran berbasis kinerja oleh pihak sekolah (agen) dilakukan agar anggaran yang diberikan oleh pemerintah (prinsipal) dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga efisiensi pengelolaan dana BOS dapat terlaksana.

Penelitian terdahulu telah meneliti tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan dana BOS yaitu yang dilakukan oleh Kurniasari *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Kurrohman (2013) yang juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini menekankan pada sistem anggaran berencana yakni memprioritaskan arah anggaran yang menekankan pada hubungan antara berbagai hasil dari program-program serta masukan-masukan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara langsung, dengan demikian dalam pengelolaan dana BOS penetapan anggaran berbasis kinerja ini akan memudahkan untuk menganalisis rencana alternatif demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan karena dalam anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal sehingga disetiap pengeluaran yang dilakukan bersifat ekonomi, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya.

### **H<sub>2</sub>: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana BOS**

Kompetensi merujuk pada pengetahuan, kemampuan, dan juga keahlian yang kemudian ditunjukkan dengan standar tertentu. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap. Seluruh aspek ini harus sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Republik Indonesia, 2003). Berdasarkan teori *stewardship*, pihak sekolah (*steward*) dituntut kemampuannya yakni berkaitan dengan kompetensi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pihak publik dan juga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan dengan menyajikan informasi keuangan yang akuntabel dan juga transparan.

Penelitian terdahulu telah meneliti tentang pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana BOS yaitu yang dilakukan oleh Sopin *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi baik secara parsial maupun secara simultan mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Noholo dan Hippy (2021) yang menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Dengan adanya kompetensi SDM maka pihak sekolah diberi kewenangan oleh pemerintah dengan harapan dapat bekerja secara maksimal sehingga pengelolaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu kompetensi SDM menjadi peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan dana BOS dampak dari sumber daya manusia yang kurang berkompeten akan mempengaruhi pengelolaan dana BOS karena terhambat oleh pihak-pihak yang tidak dapat memahami dan juga tidak bijak didalam penggunaan anggaran dana BOS.

### **H<sub>3</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh dalam memediasi hubungan antara *Good Governance* dan Pengelolaan Dana BOS**

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu (Wibowo, 2013). Berdasarkan teori *stewardship*, pihak sekolah (*steward*) dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara tepat melalui rencana anggaran yang didukung oleh kompetensi SDM sehingga dapat memaksimalkan keefektifan pengelolaan dana BOS dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gowasa *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap implementasi anggaran yang berbasis kinerja.

Apabila suatu lembaga pendidikan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami cara membuat perencanaan anggaran berbasis kinerja yang baik dan benar maka kualitas dari hasil yang akan diperoleh akan semakin optimal dan sesuai dengan sasaran. Sehingga untuk dapat mencapai prestasi kerja yang baik serta pencapaian hasil yang diinginkan maka diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang tepat dan untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja dengan tepat, kompetensi SDM memiliki peran didalamnya.

### **H<sub>4</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh dalam memediasi hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS**

**METHOD**

**383**

Penelitian ini dilakukan pada MTs Al-Ikhlas Tontouan, MA Al-Khairaat Luwuk, dan MA Al Khairaat Luwuk, Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan secara asosiatif dengan menggunakan metode survey. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yaitu kepala sekolah, guru/tenaga pendidik, dan operator di MTs Al-Ikhlas Tontouan, MTs Al-Khairaat Luwuk, dan MA Al-Khairaat Luwuk dengan jumlah sekolah untuk Madrasah Aliyah berjumlah 2 sekolah dan Madrasah Tsnowiyah. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya (Arikunto, 2012). Berdasarkan penelitian ini jumlah populasi adalah 66 orang karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka peneliti mengambil 100% dari jumlah populasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel pada penelitian adalah sebagai berikut :

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
<b>Good Governance (X1)</b>	<i>Good governance</i> adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Republik Indonesia, 2000)	Partisipasi: Hak suara Supremasi Hukum: Dilaksanakan sesuai ketentuan Adil Transparansi: Terbuka dan dapat diakses Responsivitas: Memberikan pelayanan terbaik Orientasi: Keinginan dalam melayani Kesetaraan: Perlakuan yang sama/adil Efektivitas: Kinerja yang tepat sasaran Akuntabilitas: Bertanggung jawab Strategi visi: Tujuan jangka panjang yang jelas (Nazsir, 2003)	<i>Skala Likert</i> 1-5 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju
<b>Anggaran Berbasis Kinerja (X2)</b>	Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara masukan, keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.  (Darise, 2008 )	<i>Input dan Output</i> (Masukan dan Keluaran) Efisiensi <i>Outcome</i> (Hasil)  (Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, 2005)	<i>Skala Likert</i> 1-5 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju

<b>Pengelolaan Dana BOS (Y)</b>	Pengelolaan Dana BOS merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah.  (Kusno <i>et al.</i> , 2013)	Perencanaan: Kebutuhan dana Skala prioritas Pemanfaatan: Efektifitas penggunaan dana Pelaporan dan pertanggungjawaban: Memberikan laporan pengelolaan Bisa dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2022)	<i>Skala Likert</i> 1-5 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju
---------------------------------	---	--	---

**Tabel 1.**  
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

<b>Kompetensi SDM (Z)</b>	Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap. Seluruh aspek ini harus sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. (Republik Indonesia, 2003)	Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> ) Kemampuan/Ketrampilan ( <i>Skill</i> ) Sikap ( <i>Attitude</i> )  (Hutapea dan Thoha, 2008)	<i>Skala Likert</i> 1-5 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju
---------------------------	--	--	---

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara online (melalui google formulir) karena jarak antara peneliti dengan lokasi penelitian yang jauh. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala Likert 1-5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial dengan hasil rentang sebagai berikut : (Ulum *et al.*, 2021)

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat Partial Least Square (PLS) dengan melalui beberapa tahapan yaitu (1) Uji Outer Model; (2) Uji Inner Model; (3) Uji Indirect Effect Spesific; (4) Uji Hipotesis

## RESULTS AND DISCUSSION

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru dan operator, sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah 100% dari jumlah populasi karena teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada sekolah swasta yang berada dibawah naungan Kementerian Agama di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yaitu MT's Al-Ikhlas Tontouan, MA Al-Ikhlas Tontouan, MT's AlKhairaat Luwuk, dan MA AlKhairaat Luwuk. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 13 Juni 2022 – 18 Juni 2022.

No	Nama Sekolah	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Tingkat Pengembalian Kuesioner
1.	MTs Al-Ikhlas Tontouan	16	16	100%
2.	MA Al-Ikhlas Tontouan	9	9	100%
3.	MTs AlKhairaat Luwuk	17	17	100%
4.	MA AlKhairaat Luwuk	24	24	100%
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	

**Tabel 2.**  
Distribusi Penyebaran Kuesioner

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebarakan pada setiap madrasah atau sekolah yaitu sebanyak jumlah pegawai (kepala sekolah, tenaga pendidik/guru, dan operator) yang bekerja di madrasah atau sekolah tersebut. Dari 66 kuesioner yang disebarakan sebanyak 66 kuesioner diterima kembali dan dari kuesioner yang diterima kembali, sebanyak 66 (100%) jumlah data yang dapat diolah untuk menguji hipotesis.

No	Jabatan/Bagian	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kepala Sekolah	4	6%
2.	Guru/Tenaga Pendidik	59	89%
3.	Operator	3	5%
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.**  
Distribusi Responden berdasarkan Bagian/Jabatan

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Berikut ini adalah pengujian nilai *loading factor* untuk setiap indikator yang sesuai dengan jumlah pernyataan kuesioner yaitu 39 pernyataan dalam penelitian ini:

Variabel	Indikator	Outer Loading	Kesimpulan
<i>Good Governance</i> (X1)	GG1	0.772	Valid
	GG2	0.815	Valid
	GG3	0.850	Valid
	GG4	0.844	Valid
	GG5	0.843	Valid
	GG6	0.866	Valid
	GG7	0.823	Valid
	GG8	0.850	Valid
	GG9	0.842	Valid
	GG10	0.868	Valid
	GG11	0.710	Valid
	GG12	0.800	Valid
	GG13	0.902	Valid
	GG14	0.861	Valid
	GG15	0.875	Valid
	GG16	0.818	Valid
	GG17	0.842	Valid
	GG18	0.845	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	ABK1	0.709	Valid
	ABK2	0.722	Valid
	ABK3	0.739	Valid
	ABK4	0.858	Valid
	ABK5	0.857	Valid
	ABK6	0.808	Valid
Pengelolaan Dana BOS (Y)	PDB2	0.856	Valid
	PDB3	0.787	Valid
	PDB4	0.817	Valid
	PDB6	0.876	Valid
Kompetensi SDM (Z)	KSDM1	0.841	Valid
	KSDM2	0.829	Valid
	KSDM3	0.873	Valid
	KSDM4	0.761	Valid
	KSDM5	0.880	Valid
	KSDM6	0.833	Valid
	KSDM7	0.847	Valid
	KSDM8	0.832	Valid
	KSDM9	0.839	Valid

**Tabel 4.**  
Nilai Loading  
Factor

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Dilakukan pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0 sebanyak 3 tahap untuk menguji nilai *loading factor*, PDB1 dan PDB5 merupakan indikator yang tidak valid pada pengujian tahap 1 dan 2 sehingga dilakukan eliminasi sehingga tabel yang disajikan diatas adalah

pengujian tahap ke-3. Selanjutnya pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil *fornell-lacker* ditunjukkan pada tabel 5 berikut:

	X2 (ABK)	X1 (GG)	Z (KSDM)	Y (PDB)
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	<b>0.843</b>			
<i>Good Governance</i> (X1)	0.827	<b>0.848</b>		
Kompetensi SDM (Z)	0.714	0.765	<b>0.838</b>	
Pengelolaan Dana BOS (Y)	0.546	0.711	0.827	<b>0.834</b>

**Tabel 5.**  
Fornell-Lacker

**Sumber:** Data yang diolah, 2022

Dari tabel 5 telah menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstruk lebih besar daripada nilai korelasinya dengan konstruk lainnya sehingga model penelitian dapat dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Variabel	AVE	Akar Kuadrat AVE
<i>Good Governance</i> (X1)	0.720	0.848
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	0.710	0.843
Pengelolaan Dana BOS (Y)	0.696	0.834
Kompetensi SDM (Z)	0.702	0.838

**Tabel 6.**  
Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE

**Sumber:** Data diolah, 2022

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
ABK (X2)	0.907	0.863	Reliable
GG(X1)	0.976	0.974	Reliable
KSDM (Z)	0.955	0.947	Reliable
PDB (Y)	0.902	0.854	Reliable

**Tabel 7.**  
Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

**Sumber:** Data yang diolah, 2022

	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Kompetensi SDM (Z)	0.607	0.594
Pengelolaan Dana BOS (Y)	0.731	0.718

**Sumber:** Data yang diolah, 2022

**Tabel 8.**  
Nilai R-Square

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai dari *R-Square* berpengaruh secara bersama-sama antara *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kompetensi SDM yaitu sebesar 0,607 dengan nilai *adjusted r-square* sebesar 0,594 hal ini dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen (*good governance* dan anggaran berbasis kinerja) secara bersama-sama mempengaruhi konstruk endogen (kompetensi SDM) sebesar 0,594 atau 59,4%. Sedangkan nilai *R-Square* berpengaruh secara bersama-sama antara *Good Governance*, Anggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan Dana BOS sebesar 0,731 dengan nilai *adjusted r-square* 0,718 hal ini dapat dijelaskan bahwa semua konstruk (*good governance*, anggaran berbasis kinerja, dan kompetensi SDM) secara bersama mempengaruhi pengelolaan dana BOS sebesar 71,8% dan sisanya sebesar 28,2% diterangkan oleh konstruk atau variabel lain diluar penelitian ini.

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values
Good Governance (X1) -> Kompetensi SDM (Z) -> Pengelolaan Dana BOS (Y)	0.413	0.422	0.128	3.213	<b>0.001</b>
Anggaran Berbasis Kinerja (X2) -> Kompetensi SDM (Z) -> Pengelolaan Dana BOS (Y)	0.192	0.191	0.116	1.651	<b>0.099</b>

**Sumber:** Data yang diolah, 2022

*Good Governance* terhadap Pengelolaan Dana BOS menunjukkan hasil positif dan signifikan setelah diuji menggunakan variabel *intervening* hasilnya sama positif dan signifikan sedangkan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Dana BOS menunjukkan hasil berpengaruh negatif setelah diuji menggunakan variabel *intervening* hasilnya negatif dan tidak signifikan. Berikut ini adalah nilai pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang ditunjukkan pada tabel 10:

**Tabel 9.**  
Uji Indirect Effect Spesific

Hipotesis	Hasil	Keterangan
H <sub>1</sub> <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana BOS	Koef. Beta = 0,409 T-Statistik = 2,085 P-Values = 0,037	Diterima
H <sub>2</sub> Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana BOS	Koef. Beta = -0,325 T-Statistik = 2,097 P-Values = 0,036	Ditolak
H <sub>3</sub> Kompetensi SDM memediasi hubungan antara <i>Good Governance</i> dan Pengelolaan Dana BOS	Koef. Beta = 0,553 T-Statistik = 3,939 P-Values = 0,000	Diterima
H <sub>4</sub> Kompetensi SDM memediasi hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS	Koef. Beta = 0,257 T-Statistik = 1,760 P-Values = 0,078	Ditolak

**Tabel 10.**  
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data yang diolah, 2022

**Good Governance terhadap Pengelolaan Dana BOS**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana BOS dengan nilai koefisien beta 0,409 dan t-statistik 2,085 dimana nilai ini lebih besar dari 1,96. Nilai tersebut membuktikan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOS, hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan *Good Governance* maka akan semakin baik pula Pengelolaan Dana BOS.

Menurut Lane (2000) Negara demokrasi modern dilandasi pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen yang mana hubungan prinsipal dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis kebijakan publik. Hasil pengujian pada penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, dalam paraktek pengelolaan dana bos pihak sekolah yang bertindak sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang akan dinilai akuntabilitasnya oleh prinsipal dimana hal ini merupakan prinsip dari *good governance* yang dapat mendorong pengelolaan dana bos menjadi lebih baik.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wirakusuma *et al.* (2017), Fauzan (2014), dan Rakhmawati (2018) yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana bos selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Muljo *et al.* (2014) yang juga menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial *good governance* berpengaruh positif dengan pengelolaan anggaran dimana hal ini dapat terjadi karena adanya tuntutan keterbukaan dan keandalan informasi sehingga pengelolaan dana bos semakin efektif.

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai *outer loading* dari indikator pada variabel *good governance* ditemukan nilai *outer loading* tertinggi yang terdapat pada indikator GG13 yaitu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien diperoleh nilai sebesar 0,902. Adapun jawaban responden terkait indikator GG13 adalah sebanyak 34 orang menyatakan setuju (51,5%) dan 26 orang menyatakan sangat setuju (39,4%) serta hanya 6 orang yang memberikan pernyataan netral (9,1%) oleh karena itu temuan pada penelitian ini menyatakan *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS.

Penerapan prinsip *good governance* yang semakin baik akan menunjukkan kinerja suatu organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan dari *good governance* adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab, efektif serta efisien (Kurniawan, 2005). Untuk mewujudkan pengelolaan dana bos yang baik maka suatu lembaga pendidikan (sekolah) harus didukung penerapan *good governance* yang menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana bos dimana hal ini perlu untuk senantiasa dilakukan dan ditingkatkan karena semakin tinggi penerapan *good governance* maka akan semakin baik pula kualitas dari pengelolaan dana bos itu sendiri.

### **Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Dana BOS**

Hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan dana bos artinya terjadi hubungan terbalik bahwa semakin tinggi penerapan anggaran berbasis kinerja semakin rendah pengelolaan dana bos tentu hal ini bertentangan dari konsep dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja dan juga bertolak belakang dengan teori keagenan, dimana penetapan anggaran berbasis kinerja oleh pihak sekolah (agen) dilakukan agar anggaran yang diberikan oleh pemerintah (prinsipal) dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga efisiensi pengelolaan dana bos dapat terlaksana.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran selain itu Kurrohman (2013) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan lebih ekonomis dan efisien setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yumiati dan Nadirsyah (2016), Harahap *et al.* (2020), dan Kurniawan *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran dimana penyerapan anggaran ini termasuk kedalam pengelolaan anggaran.

Anggaran berbasis kinerja yang berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari 6 jumlah pernyataan yang memenuhi kriteria sebagai indikator dalam mengukur pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan dana BOS, akan tetapi nilai *outer loading* tersebut belum dalam kategori sempurna, karena nilai *outer loading* yang sempurna adalah 1.000 (Purba, 2021). Adapun jawaban dari responden untuk keenam indikator tersebut yaitu: indikator pertama mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebanyak 38 orang (57,6%), indikator kedua mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 30 orang (45,5%), indikator ketiga mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 orang (54,5%), indikator keempat mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 32 orang (48,5%), indikator kelima mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (53%), dan indikator keenam mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 orang (51,5%).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin rendah pengelolaan dana BOS yang dilakukan maksudnya adalah apabila anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan baik maka upaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengelolaan tidaklah besar atau semakin rendah hal tersebut dapat terbukti dari mayoritas jawaban yang diberikan responden terkait indikator efisiensi pada variabel anggaran berbasis kinerja yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan dana BOS.

**Kompetensi SDM memediasi hubungan antara *Good Governance* dan Pengelolaan Dana BOS**

Hasil pengujian pada penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, menurut Putri dan Djuita (2021) teori *stewardship* memperlihatkan tugas manager dalam melaksanakan fungsi-fungsi sesuai dengan prinsip manajemen dalam menggerakkan roda organisasi sehingga mampu menjadi agen pelayanan kepada masyarakat. Pihak pihak sekolah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap publik dimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang diberikan secara efektif serta menyajikan informasi yang bersifat akuntabel. Kompetensi memiliki peranan yang penting karena berkaitan dengan kemampuan dasar seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan (Spencer dan Spencer, 1993).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sopin *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi baik secara parsial maupun simultan mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS selain itu Noholo dan Hippy (2021) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta penelitian serupa juga dilakukan oleh Iqbal (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pihak sekolah akan mengarahkan semua kemampuan serta keahliannya untuk dapat mengefektifkan pengelolaan dana BOS.

Dengan adanya kompetensi SDM pihak sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal sehingga pengelolaan dana BOS dapat dilakukan secara baik oleh karena itu kompetensi SDM memiliki peran yang penting karena apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkompeten maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari pengelolaan dana BOS itu sendiri karena dapat menyebabkan penggunaan dana yang dilakukan kurang atau bahkan tidak tepat.

### **Kompetensi SDM memediasi hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS**

Hasil pengujian pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori *stewardship* bahwa *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* akan berusaha untuk mencapai sasaran dari organisasinya (Anton, 2010). Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gowasa *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran selain itu Purba (2021) juga menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran dimana penyerapan anggaran ini termasuk kedalam pengelolaan anggaran.

Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk suatu program yang mana penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan rencana belanja dana yang baik yang digunakan secara efektif dan efisien (Purba, 2021). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memediasi hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan pengelolaan dana BOS dapat juga disebabkan oleh mayoritas responden dalam penelitian ini yang mana sebesar 89% merupakan responden yang menjabat sebagai

guru/tenaga pendidik. Selain itu penyebab lainnya adalah tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan atau dana yang diberikan agar dapat dilakukan secara maksimal dan efektif yang mana diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai hasil yang diinginkan sehingga ada dan tidaknya kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh bagi anggaran berbasis kinerja untuk mempengaruhi pengelolaan dana BOS.

## CONCLUSION

*Good Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOS, dalam praktek pengelolaan dana bos pihak sekolah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang akan dinilai akuntabilitasnya sehingga dapat mendorong pengelolaan dana bos menjadi lebih baik. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana BOS, semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin rendah pengelolaan dana BOS yang dilakukan atau upaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengelolaan tidaklah besar.

Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan antara *Good Governance* dan Pengelolaan Dana BOS, dengan adanya kompetensi SDM pihak sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal dengan mengarahkan semua kemampuan serta keahliannya untuk dapat mengefektifkan pengelolaan dana BOS. Kompetensi SDM tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS, adanya tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara maksimal dan efektif diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja sehingga ada dan tidaknya kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh bagi anggaran berbasis kinerja untuk mempengaruhi pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya, keterbatasan media penyebaran kuesioner sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online melalui *google formulir* bertepatan dengan kegiatan sekolah yang dilaksanakan diwaktu yang bersamaan dengan penyebaran kuesioner, data yang diperoleh sesuai dengan persepsi responden sehingga data yang dihasilkan kemungkinan akan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, dan penelitian ini hanya menggunakan 4 sekolah swasta di satu kecamatan.

Bagi instansi pendidikan (sekolah) penerima dana BOS diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan perhatiannya terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana BOS sehingga anggaran dana tersebut dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya, bagi peneliti selanjutnya memperkirakan waktu penyebaran kuesioner dengan jumlah responden yang diperlukan apabila penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* sehingga rentang waktu yang diperlukan tidak begitu lama, dan bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas terkait responden penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih dalam mengenai pengkajian penelitian tersebut.

REFERENCES

393

- Anton. 2010. "Menuju Teori Stewardship Manajemen". *Majalah Ilmiah Informatika*, Vol. 1, No. 2, hlm: 61-80.
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta Rieneka Cipta
- Artikelpendidikan.id. 2022. "Ciri-ciri Good Governance, Karakteristik Dasar dan Pengembangannya" <https://artikelpendidikan.id/ciri-ciri-good-governance/?msclkid=9d1d9593c24a11ecb52c911dfa930d02>. [diakses pada 20 April 2022].
- Asrida. 2012. "Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen". *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 1, No. 1, hlm: 29-40.
- Bacon, D. R., P. L. Sauer, dan M. Young. 1995. "Composite Reliability in Structural Equations Modeling ". *Journal Educational Pshychological Measurement*, Vol. 55, No. 3, hlm: 394-406. <https://doi.org/10.1177/0013164495055003003>
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- . 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* Jakarta Erlangga
- Dailiati, S., Hernimawati, dan Sudaryanto. 2017. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru". *Jurnal Niara*, Vol. 9, No. 2, hlm: 1-8. <https://doi.org/10.31849/ni.v9i2.2096>
- Darise, N. 2008 *Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta PT Indeks
- Darwin, M., dan K. Umam. 2020. "Indirect Effect Analysis on Structural Equation Modeling (Comparative Study of Using Amos and SmartPLS Software) ". *Nucleus*, Vol. 1, No. 2, hlm: 50-57. <https://doi.org/10.37010/nuc.v1i2.160>
- Databoks.katadata.co.id. 2022. "ICW: Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan Sejak 2016-2021" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021>. [diakses pada 24 April 2022].
- Deddi, N. 2006 *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta Salemba Empat
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2005. *Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fauzan. 2014. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 10, No. 3, hlm: 158-169. <https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.776>

Ghozali, I., dan H. Latan. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris* Semarang: Undip.

Gowasa, L., Subhilhar, dan A. Suriadi. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Anggaran yang Berbasis Kinerja ". *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, hlm: 54-60. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i2.25>

Harahap, S. A. S., T. Taufik, dan Nurazlina. 2020. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai)". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, hlm: 1-10. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i1.5>

Hestanto.web.id. 2022. "Teori Keagenan (Agency Theory) " <https://www.hestanto.web.id/teori-keagenan-agency-theory/?msclkid=8a4ccf0ac1c511ecb6334e37f1131823>. [diakses pada 20 April 2022].

Hidayat, H. M., Ramdany, dan Samukri. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Studi Pada Lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, hlm: 51-63. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.16>

Hutapea, P., dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Iqbal, M. 2022. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi". *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, Vol. 5, No. 1, hlm: 747-764.

Jefri, R. 2018. "Teori Stewardship dan Good Governance ". *Jurnal Riset Edisi XXVI*, Vol. 4, No. 3, hlm: 14-26.

Jensen, dan Mecklig. 1976. "The Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure ". *Journal of Financial and Economics*, Vol., No., hlm: 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Karsana, I. W., dan I. G. N. A. Suaryana. 2017 "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21, No. 1, hlm: 643-670.

Kurniasari, D., D. Kurniasari, dan M. S. Marta. 2017. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat ". *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, hlm: 71-88. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1446>

Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik* Yogyakarta Pembaharuan

- 395** Kurniawan, W., E. Sutisman, Y. Ermawati, M. R. Pasolo, dan Sumartono. 2020. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Pengguna Anggaran Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua)". *The Journal Of Business and Management Research*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1-11.
- Kurrohman, T. 2013. "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur ". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, hlm: 1-11.
- Kusno, M. Suib, dan Wahyudi. 2013. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri ". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 4, hlm: 1-17.
- Lane, J. E. 2000. *The Public Sector - Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446220085>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moehariono. 2014. *Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi - Competency Based Human Resources Management* Jakarta: Rajawali Pers
- Muljo, H. H., H. Kurniawati, dan Pahala. 2014. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran ". *Binus: Business Review*, Vol. 5, No. 2, hlm: 537-550. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1014>
- Nazsir, N. 2003. "Good Governance ". *Mediator*, Vol. 4, No. 1, hlm: 135-150.
- Noholo, S., dan M. Z. Hippy. 2021. "Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan ". *Jambura Accounting Review*, Vol. 2, No. 1, hlm: 66-75. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.28>
- Pendidikan Agama dan Keagamaan Tim Peneliti Puslitbang. 2011. *Laporan Hasil Studi Biaya Pendidikan Madrasah*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Purba, D. S. 2021. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satker Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Putri, A. U., dan P. Djuita. 2021. "Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang". *Jurnal Proaksi*, Vol. 8, No. 1, hlm: 226-232. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1786>
- Rahmawati, R. S., dan J. F. Ishak. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi". *Indonesia Accounting Research Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm: 180-189. <https://doi.org/10.30997/jakd.v5i1.1822>

- Rais, M. 2019. *Pengelolaan Dana BOS dan KIP di Madrasah*. Bantul Lintas Nalar
- Rakhmawati, I. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder sebagai Variabel Moderasi ". *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 1, No. 1, hlm: 95-112. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pelatihan Pegawai Negeri Sipil*
- . 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*
- . 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1*.
- . 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*
- Sekaran, U. 2011. *Research Methods for Business* Jakarta Salemba Empat
- Silalahi, S. P. 2012. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kota Dumai)". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20, No. 3, hlm: 1-20.
- Sopin, Asqolani, dan B. Johantari. 2022. "Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah". *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 6, No. 1, hlm: 59-80. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3921>
- Spencer, M. L., dan M. S. Spencer. 1993. *Competence Atwork: Models For Superior Performance* New York. USA John Wily & Son
- Sulistiyani, A. T., dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ulum, I., A. Juanda, dan D. Leniwati. 2021. *Metodologi Penelitian Akuntansi* Malang: Baskara Media.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wirakusuma, M. S., P. Julianto, dan M. A. Prayudi. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, dan Budaya Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Empiris pada Sekolah-sekolah di Kota Denpasar) ". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol. 8, No. 2, hlm: 1-12.

Yumiati, F., dan I. Nadirsyah. 2016. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPA Di Pemerintah Aceh". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, hlm: 43-49.

Zeyn, E. 2011. "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan". *Trikonomika*, Vol. 10, No. 1, hlm: 52-62. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>